

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
Kata Pengantar Ketua MTI	
PERIZINAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK	xv
BAB I	
BAGAIMANA PERIZINAN DI DAERAH?	1
1.1 Kualitas Layanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah	1
1.2 Mengapa Perizinan?	5
1.3 Kerangka Konseptual	11
1.3.1 Konsep Desentralisasi	11
1.3.2 Konsep Pelayanan Publik	12
1.3.3 Konsep Pelayanan Terpadu (<i>One Stop Service</i>)	13
1.3.4 Konsep Investasi	14
1.3.5 Konsep <i>Multiplier Effect</i>	16
1.4 Bagaimana Buku ini Disusun	17
BAB II	
TINJAUAN NORMATIF PERATURAN PERIZINAN INVESTASI	21
2.1 Tinjauan Normatif	21
2.1.1 Peraturan Perizinan Sebelum Otonomi Daerah	21
- Paket deregulasi Tahun 1993 (Pakto 1993) dan Tahun 1994	22
2.1.2 Peraturan Perizinan Setelah Otonomi Daerah	24
a. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004	25
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006	30
c. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2006	31
d. Inpres No 6 Tahun 2007	32
2.2 Tinjauan Objektif Perizinan di Daerah	34
2.2.1 Sebelum era otonomi daerah	35

2.2.2	Era Otonomi Daerah	38
2.2.3	Reformasi Perizinan	42

BAB III

KARAKTERISTIK TIGA KOTA	53
3.1 Kabupaten Purbalingga	53
3.1.1 Geografis	53
3.1.2 Demografi	54
3.1.3 Potensi Daerah	55
a. Pertanian	55
b. Industri manufaktur, kerajinan, dan makanan olahan	55
c. Perdagangan dan jasa	56
d. Pariwisata	56
e. Ketenagakerjaan	58
3.2 Kota Makassar	58
3.2.1 Geografis	58
3.2.2 Demografi	60
3.2.3 Potensi Kota Makassar	61
3.3 Kota Banjarbaru	62
3.3.1 Geografi	62
3.3.2 Demografi	63
3.3.3 Potensi Investasi Kota Banjarbaru	64
a. Pembangunan Agrowisata sayur dan buah	64
b. Pengembangan Tanaman Hias	64
c. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini dengan Kapasitas Ton TBS per jam	65
d. Pengelolaan Air Minum	65
e. Pembangunan Kawasan Industri	65
f. Getah Pepaya	66
g. Pembangunan Jasa Perhotelan, Retail dan Franchise	66
h. Budidaya Penggemukan Sapi Terpadu	67
i. Pembangunan Pusat Pembibitan Ikan	67
j. Rumah Sakit Skala Regional	67
k. Pengolahan Keramik	68

BAB IV

REFORMASI PERIZINAN USAHA DI DAERAH	69
4.1 Kabupaten Purbalingga	70
4.1.1 Tujuan	70
4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan KPPT	71
4.1.3 Visi dan Misi KPPT Kabupaten Purbalingga	73
4.1.4 Prosedur Kerja KPPT Kabupaten Purbalingga	74
4.1.5 Prosedur pelayanan perizinan terstruktur	75
4.1.6 Perizinan Tidak Terstruktur	77
4.1.7 Jenis layanan Izin KPPT Kabupaten Purbalingga	79
4.1.8 Akses dan Data Informasi	79
4.1.9 <i>Best Practice</i> KPPT Kabupaten Purbalingga	81
4.1.10 Hambatan Perizinan di KPPT Kabupaten Purbalingga	82
4.1.11 Hambatan Umum Iklim Investasi di Kabupaten Purbalingga	83
- Permasalahan Eksternal	83
a. Perkembangan Pelimpahan Penduduk dan Kegiatan Wilayah	83
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kota yang tidak sesuai dengan peran dan fungsi kota	84
c. Perkembangan Kabupaten Purbalingga mengarahkan kecenderungan orientasi pemenuhan pelayanan masyarakatnya yang akan semakin menguat ke Kota Purbalingga	84
- Permasalahan Utama yang bersifat Internal	85
a. Kegiatan Industri yang menyebar di beberapa penjurukota	85
b. Belum dibangunnya Jalan Lingkar	85
c. Bercampurnya kegiatan industri dengan kawasan permukiman	86
4.2 Kota Makassar	86
4.2.1 Kedudukan dan Fungsi KPAP Kota Makassar	88
a. Kedudukan	88
b. Tugas	88

c.	Fungsi	88
d.	Mekanisme Pelayanan Perizinan Kota Makassar	89
4.2.2	Perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki layanan perizinan usaha	90
4.2.3	Hambatan Perizinan di KPAP Kota Makassar	93
4.3	Kota Banjarbaru	95
4.3.1	Latar Belakang	95
a.	Visi dan Misi	96
b.	Misi	96
c.	Ikrar Pelayanan BP2T Kota Banjarbaru	97
d.	Beberapa perbaikan BP2T	98
e.	Inovasi BP2T Kota Banjarbaru	100
f.	Alur Pengaduan Kualitas Pelayanan BP2T Kota Banjarbaru	100
g.	Hambatan Pengembangan BP2T Kota Banjarbaru	107

BAB V

DAMPAK PENERAPAN INOVASI LAYANAN PERIZINAN		111
5.1	Kabupaten Purbalingga	112
5.1.1	Tingkat Pertumbuhan Usaha	112
5.1.2	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga	115
5.1.3	Pertumbuhan Ekonomi	116
5.1.4	PDRB Per Kapita	116
5.1.5	Penyerapan Tenaga Kerja	117
5.1.6	Tumbuhnya Plasma	118
5.1.7	Menurunnya penduduk miskin	122
5.1.8	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	124
5.1.9	Listrik dan Air	124
5.1.10	Aspek Sosial	124
5.1.11	Tumbuhnya kesadaran sosial	127
5.2	Kota Makassar	130
5.2.1	Tumbuhnya Jumlah Usaha	130
5.2.2	Perkembangan Ekonomi	132
5.2.3	Penyerapan Tenaga Kerja	133
5.2.4	Infrastruktur	134
5.2.5	Listrik, Gas dan Air	137

5.3	Kota Banjarbaru	139
5.3.1	Struktur Ekonomi	139
5.3.2	Tumbuhnya Izin Usaha	143
5.3.3	Pertumbuhan PDRB Kota Banjarbaru	145
5.3.4	Pertumbuhan Ekonomi	146
5.3.5	PDRB Per Kapita	147
5.3.6	Penyerapan Tenaga Kerja	149
5.3.7	Menurunnya penduduk miskin	151
5.3.8	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	152
5.3.9	Listrik dan Air	154
5.3.10	Aspek Sosial	154

BAB VI

DIMENSI PERIZINAN DAN KOMPARASI ANTAR DAERAH		157
6.1	Dimensi Sosial Budaya	157
6.2	Dimensi Politik	159
6.3	Dimensi Ekonomi	160
6.4	Komparasi Layanan Perizinan Antar Daerah	162
6.5	Gambaran Tipologi Perizinan Usaha	168
6.5.1	Tipologi Figur Kepemimpinan	169
6.5.2	Tipologi Potensi Daerah dan Peran Pengusaha	170
6.5.3	Tipologi Infrastruktur dan Mekanisme Kerja	174
6.6	Format Ideal Perizinan Usaha	175
6.7	<i>Best Practice</i> Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen	180
6.8	Dampak Positif Keberadaan PBT Kabupaten Sragen	186

BAB VII

PENUTUP	189
Rekomendasi	194

DAFTAR PUSTAKA	198
----------------	-----

BIODATA PENULIS	202
-----------------	-----